



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem ini juga mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya organisasi dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan masing-masing Instansi Pemerintah di dalam satu kerangka Sistem Akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini setiap Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diwajibkan menyusun laporan pencapaian tujuan strategik organisasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik. Penyusunan LKjIP dalam SAKIP dilakukan melalui penyusunan rencana strategik, penyusunan rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

LKjIP memiliki peran sebagai instrumen pengendali, penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Untuk keperluan tersebut maka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata merupakan hal yang semestinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdasarkan kaidah hasil guna dan daya guna, akuntabel, dan bersih dari KKN.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsabilatas manajerial pada setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang ada. Masing-masing pejabat struktural dan staf dibawahnya bertanggungjawab atas pelaksanaan

kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Konsep ini membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali.

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang nyata dan dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak yang diberi tugas. Dalam konsep ini terkandung perencanaan, pelaksanaan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat dinilai oleh pihak berwenang. Sedangkan kegiatan yang tidak terkendali merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan akan tetapi masih dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan organisasi kepadanya yang harus dipertanggungjawabkan secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas tersebut merupakan perwujudan dari kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan LKjIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya yaitu laporan harus dibuat secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu pelaporan harus memperhatikan:

1. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
2. Prinsip Prioritas yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Instansi Instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
3. Prinsip Manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan kinerja Instansi yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini juga perlu diperhatikan ciri-ciri pelaporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dipahami (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Buluspesantrern sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Selain kedudukan sebagai Kepala SKPD, Camat adalah Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani urusan perekonomian Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantrern adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantrern

No.	Jabatan	Eselon
1.	Camat	III.a
2.	Sekretaris Camat	III.b
3.	Kepala Seksi	IV.a
4.	Kepala Sub Bagian	IV.b

Camat membawahi Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi sebanyak 4 seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

Sementara Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi:

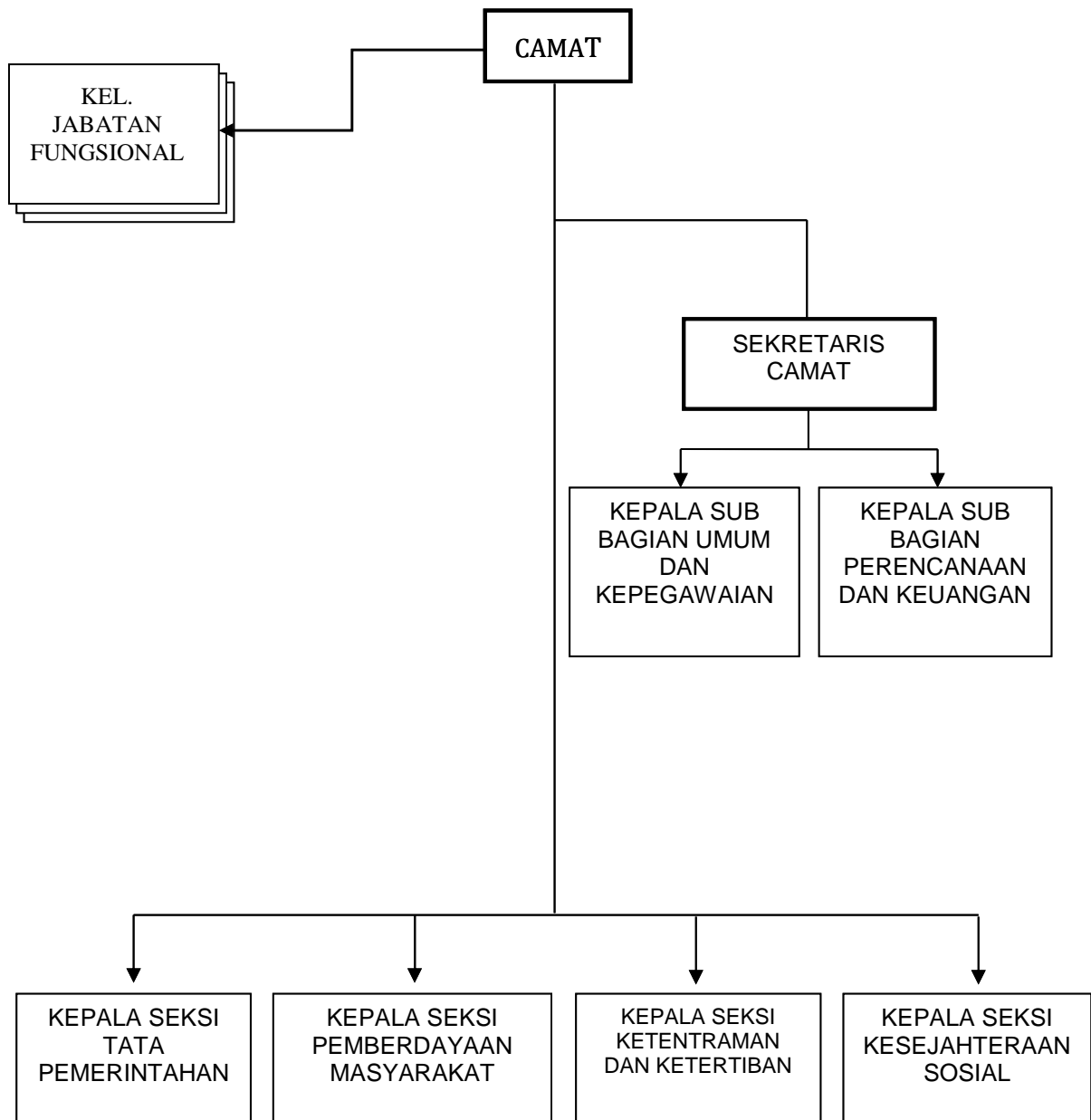
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dimungkinkan adanya Jabatan Fungsional Umum,

tetapi sampai dengan saat ini belum ada realisasi pengisian jabatan tersebut.

Bagan organisasi Kecamatan Buluspesantrern dapat dilihat pada Gambar di bawah ini

Gambar 1.
Bagan Organisasi Kecamatan Buluspesantrern.



Aparatur Pemerintah Kecamatan Buluspesantrern pada tahun 2020 ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 5 orang. Adapun susunan kepegawaian di Kantor Kecamatan Buluspesantrern sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Buluspesantren

No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1 Orang
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 Orang
8.	Kasi Pely.Umum dan Kesejahteraan Sosial	1 Orang
9.	Staf	5 Orang
	Jumlah	13 Orang

Adapun Jumlah Pegawai menurut golongan pangkat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina,	IV/a	1 Orang
2.	Penata Tingkat I,	III/d	5 Orang
3.	Penata,	III/c	1 Orang
4.	Penata Muda	III/a	1 Orang
4.	Penata Muda Tingkat I,	III/b	3 Orang
5.	Pengatur Tingkat I,	II/d	2 Orang
	Jumlah		13 Orang

C. Aspek Strategis/ Issue Strategis Organisasi

Untuk selalu tetap eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan berubah dengan cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus selalu terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan ini harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan ber kelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Buluspesantrern untuk kondisi lima tahun kedepan :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan SKPD yang semakin baik;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, standar pelayanan dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan aparatur pemerintah; serta,
4. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (Stakeholders).

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realitis, rasional dan konprehensif. Strategi Pemerintahan Kecamatan Buluspesantrern untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan maka strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Buluspesantrern adalah "Terwujudnya Kecamatan Sebagai Institusi Pelayanan Masyarakat Yang Profesional " dan Koordinator Pembina Kewilayahan yang profesional dengan upaya pendekatan yang berprinsip dengan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pemberian Pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi, peningkatan pembinaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi kepada pemerintah desa;
3. Penguatan Kapasitas kelembagaan kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat desa;
4. Pengembangan potensi sumber daya alam, perikanan, kelautan dan wisata. Dari uraian di atas tentang visi, misi, arah kebijakan dan strategi

kemudian dirumuskan *issue strategis* yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Buluspesantrern terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta memiliki kualitas pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
4. Meningkatnya potensi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam antara lain sumber daya perikanan dan kelautan termasuk potensi pengembangan wisata di Kecamatan Buluspesantrern.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan ; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya : Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantrern berisi program-program Rencana program Kecamatan Buluspesantrern berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana;
3. Program pengembangan data/ statistik;
4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah;
5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
11. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
12. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
14. Program perencanaan pembangunan daerah.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan kompenen instalansi listrk/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Pengadaan peralatan gedung kantor;
15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
16. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas;
18. Pengadaan mebeleur;
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
20. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;
21. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
22. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
23. Fasilitasi TKP2KDes/ Kel;
24. Pembinaan sosial masyarakat;
25. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
26. Kegiatan pembinaan anggota Linmas;
27. Kegiatan Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah (Kuota Kecamatan);
28. Fasilitasi APBDes;
29. Fasilitasi program pembangunan;
30. Pembinaan PKK;
31. Pelatihan keterampilan bagi pemuda;
32. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
33. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
34. Penyelenggaraan Musrenbangcam.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 2.1

2.2 Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja tahun 2020 Kantor Kecamatan Buluspesantrern Kabupaten Kebumen termuat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KECAMATAN BULUSPESANTRERN KABUPATEN KEBUMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan	100 %	23,00%	24,05%	31,00%	21,93%
		Capaian Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Predikat	-	-	-	B Predikat
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan prasarana kantor	3 buah Meja Kerja , 1 unit PC, 2 unit Laptop, 2 Printer Epson, 2 Canon, 1 Meja Rapat, Kipas Angin Miyako dan Cosmos 4 buah, 25 buah Matrix, 2 buah Keyboard , 2 buah Mouse, 1 buah Batal Mouse, 15 buah Taplak Meja	51,60%	48,39%	-	-
		Jumlah mebeleur	60 kursi lipat besi	100%	-	-	-
		Jumlah yang dipelihara Rumah dinas camat	1 Paket	100%	-	-	-

		Jumlah gedung Kantor	3 Unit		100%	-	-
		Terpeliharanya meubelair kantor	-		-	-	-
3.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkadeas	17 Desa	-	86%	-	14%
4.	Terlaksananya Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik	Jumlah dokumen Data Base & Profil Desa/Kecamatan	2 Dokumen	-	50%	-	50%
5.	Tersusunya dan Terkumpulnya data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan	8 dokumen	23,62%	20,60%	38,05	17,71%
6.	Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penurunan Kemiskinan & Penurunan Kesenjangan Sosial (TKP2KDes)	1 Kegiatan				100%
7.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina	42 Orang	100%			
8.	Terlaksananya Pembinaan Sosial masyarakat	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan			100%	
9.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat. dalam Membangun Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi dan Tersusunnya APBDes tahun 2019 2. Terfasilitasinya program-program pembangunan di desa.	42 desa	25%	25%	25%	25%
10.	Meningkatnya partisipasi perempuan perdesaan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan melalui kegiatan PKK Desa/Kecamatan dan meningkatkan	Jumlah PKK Desa yang dibina	21 Desa	48.48%	17,13%	27.28%	70.94%

	kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan babonisasi.						
11.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI tahun 2019.	3 kegiatan		99.99%		
12.	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	Terlaksananya program kuota kecamatan	-	-	-	-	-
13.	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Prosentase Pelayanan	100%	26.17%	25.71%	25.58%	25%
14.	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	Musrenbangc am Tahun 2019.	2 Kali	0.98%	3.94%	19.55%	75.52%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.100.000	13 Keg
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125.000.000	5 Keg.
3.	Pengembangan Data/Informasi/Satistik Daerah	13.000.000	1 Keg.
4.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	
5.	Program Pengembangan Data/Informasi /Penyusunan Dokumen Perencanaan	10.000.000	8 Dok.
6.	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	-	
7.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	-	
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	11.000.000	1 Keg.
7.	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	20.000.000	2 Keg.
8.	Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	15.000.000	3 Keg.
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	52.667.000	21 Desa
10.	Peningkatan Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	27.630.000	21 Desa
11.	Peningkatan Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	65.000.000	1 Bulan

12. Peningkatan Perencanaan
Pembangunan Daerah 25.000.000 3 Keg.

JUMLAH 541.397.000

Kebumen, 31 Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI KEBUMEN

Pihak Pertama
CAMAT BULUSPESANTREN

YAZID MAHFUDZ

Drs.BUDHI SUWANTO, M.Si

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Secara umum Pemerintah Kecamatan Buluspesantrern sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantrern Tahun 2016-2021

Pada tahun anggaran 2020 terdapat 13 sasaran yang ingin dicapai dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas penyelesaian tugas – tugas organisasi Kantor Kecamatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas – tugas administrasi perkantoran	13 kegiatan		91,6%

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kantoran dengan indikator kinerja meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas – tugas administrasi perkantoran yang memadahi dengan target tahun 2019 sejumlah 13 kegiatan, terealisasi sebanyak 13 kegiatan atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan mencapai 91,60% dari pagu Rp. 145.120.000,- terealisasi 132.924.2898,-. Adapun anggaran yang penyerapannya tidak maksimal yaitu anggaran untuk kegiatan Sumber Daya Air dan Listrik dan anggaran penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional karena kendaraan ada 3 baru sehingga mata anggaran pembeli suku cadang tidak terserap.

Tabel 3.2
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	6 kegiatan	6 kegiatan.	99,97

Sasaran meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor dengan indikator kinerja berupa tercukupinya sarana dan prasarana Gedung Kantor dan perlengkapan kantor yang memadai dengan target tahun 2019 sejumlah 6 kegiatan, terealisasi sebanyak 6 kegiatan atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan mendekati 100%, yaitu 99,97% dari pagu Rp. 138.553.000,- terserap 138.512.500,-. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	21 Desa.	21 Desa.	100

Sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator kinerja berupa Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa Kecamatan Buluspesantrern dengan target tahun 2019 memfasilitasi sejumlah 22 desa melaksanakan Pilkades, terfasilitasi sebanyak 21 desa atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 100%, dari anggaran Rp. 31.000.000 terserap Rp. 31.000.000, sasaran tersebut diwujudkan melalui Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya kegiatan Kuota Kecamatan	5 Paket.	5 Paket.	98,95

Sasaran Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator kinerja berupa Terlaksananya kegiatan Kuota Kecamatan OPD Kecamatan Buluspesantrern dengan target tahun 2019 sejumlah 5 Paket kegiatan Kuota Kecamatan, terealisasi sebanyak 5 Paket atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 98,95%, dari anggaran Rp. 946.779.000 terserap Rp. 936.877.000, ada sekitar Rp. 9.902.000,- efisiensi anggaran dari 5 Paket tersebut.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Data Penyusunan perencanaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Meningkatkan Kualitas Data/Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi 2019	6 Dok.	6 Dok.	97,67

Sasaran Tersusunnya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja berupa Tersusunnya Dokumen-dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Buluspesantrern dengan target tahun 2019 sejumlah 6 dokumen, terealisasi sebanyak 6 dokumen atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 97,67%, dari anggaran Rp. 5.830.000,- terserap Rp. 5.694.000,- Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program penyusunan dan pengumpulan data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terselamatnya Dokumen/Arsip Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Terselamatnya Dokumen/Arsip Daerah	Terdatanya dan tertatanya arsip daerah	1 Keg.	1 Keg.	86,07

Sasaran Terselamatnya Dokumen/Arsip Daerah dengan indikator kinerja berupa Terdatanya dan tertatanya arsip daerah OPD Kecamatan Buluspesantrern dengan target tahun 2019 sejumlah 1 kegiatan penataan arsip, terealisasi sebanyak 1 kegiatan tersebut atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 86,07%, dari anggaran Rp. 7.000.000,- terserap Rp. 6.025.000,- Efisiensi anggran untuk program ini ada di mata rekening belanja perjalanan dinas. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Karang Taruna dan Pembinaan Sosial Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI I	ANGGARAN %
Meningkatkan Peran serta Kepemudaan dan Pembinaan Sosial Masyarakat.	Terbinanya Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Terkirimnya peserta lomba MTQ, Lomba Tabuh Bedug dan Karnaval tingkat Kabupaten.	4 paket kegiatan	4 paket kegiatan	100

Sasaran meningkatnya Peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan dengan indikator kinerja berupa Pembinaan organisasi kepemudaan dan terkirimnya peserta lomba MTQ, Lomba Tabuh Bedug dan Karnaval tingkat Kabupaten dengan target tahun 2019 sejumlah 4 kegiatan, terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 100% yaitu dari anggaran Rp.

14.840.000 terserap Rp.14.840.000. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Masyarakat (PATEN)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Terpenuhinya Pelayanan Masyarakat dengan baik	12 bulan	12 bulan	99,59

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dengan indikator kinerja berupa terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat dengan target tahun 2019 sejumlah 12 bulan , terealisasi 12 bulan atau sebesar 100%. Untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,59%, Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai luhur budaya bangsa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Peran serta Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Upacara HUT RI, Pelatihan Paskibra dan rentetan acara Peringatan HUT RI.	1 paket	1 paket	99,42

Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat akan Nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan indikator kinerja berupa terlaksananya Pelaksanaan HUT RI Tahun 2019 sejumlah 1 Paket Kegiatan Peringatan HUT RI tahun 2019, terealisasi seluruh paket kegiatan tersebut atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran sebesar 99,42% Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Tahun 2019.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Forum TKP2KDES

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	Terkoordinasinya Perumusan Kebijakan Penanggulangan kemiskinan	1 paket	1 paket	83,78

Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan indikator kinerja berupa terlaksananya Rapat Koordinasi/Forumn TKP2KDes dengan target tahun 2019 sejumlah 24 desa , terealisasi sebanyak 24 desa atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 83,78%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019.

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Data Potensi Kecamatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Kualitas Data Potensi Kecamatan dan Desa	Penyusunan Database Kecamatan Tahun 2019	24 Desa	24 Desa/	98,30

Sasaran meningkatnya kualitas data potensi Kecamatan dengan indikator kinerja berupa Penyusunan Database Kecamatan Tahun 2019 sejumlah 24 desa, terealisasi sebanyak 24 desa atau sebesar 100%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Serta tersusunnya Buku Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD) dengan target tahun 2019 sebanyak 24 desa terealisasi sebanyak 24 desa atau target sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran sejumlah, 98,30%.

Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program pengembangan data/informasi/statistik daerah tahun 2019.

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDES

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Tertib Administrasi Dokumen Pemerintah Desa	Terfasilitasinya penyusunan APBDesa Terfasilitasinya Program Pembangunan	24 Desa	24 Desa	97,06

Sasaran meningkatnya tertib administrasi dokumen pemerintahan desa dengan indikator kinerja berupa pendampingan Penyusunan APBDesa dengan target tahun 2019 sejumlah 24 desa, terealisasi sebanyak 24 desa atau sebesar 100%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan untuk realisasi penyerapan anggaran sejumlah 97,06 %

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa.	Terselenggaranya Pembinaan Perempuan di Perdesaan	24 Desa	24 Desa	98,06

Sasaran meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja berupa terselenggaranya pembinaan perempuan di perdesaan dengan target tahun 2019 sejumlah 24 desa, terealisasi sebanyak 24 desa atau sebesar 100%, adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,06 %. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

Tabel 3.14

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Pembangunan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Sistem Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif	Terselenggaranya Musrenbangcam Tahun 2019	24 Desa	24 Desa	99,75

Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan indikator kinerja berupa terselenggaranya Musrenbangdes pada 24 desa dan Musrenbangcam dengan target tahun 2019 sebanyak 24 Desa terealisasi sebanyak 24 Desa dan Pra Musrenbangcam 1 hari & Musrenbangcam 1 hari atau target sebesar 100 % untuk realisasi anggaran sebesar 99,75 %.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut dalam Tahun 2019 Kecamatan Buluspesantrern memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 3.230.495.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.671.428.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.559.067.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) .

Adapun Realisasi keuangan tahun 2019 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.524.509.785,- (Satu milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) atau 91,21% sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar RP. 1.534.397.789,- atau sebesar 98,42% dari anggaran. Ada anggaran yang tidak terserap yang disebabkan karena ada Efisiensi penggunaan anggaran di belanja hibah, kekeliruan penggunaan rekening di belanja

honorarium Non-PNS, pembayaran rekening listrik dan air serta sebagian efisiensi belanja di kegiatan lain Tahun Anggaran 2020.

Realisasi anggaran per-program dan per-kegiatan di OPD Kecamatan Buluspesantrern Tahun Anggaran 2020 termuat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Per-Program

URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2019	REALISASI T.A. 2019	PROSENTASE %
Non - Program	1.712.920.000	1.524.509.785	91,21
Penyediaan Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	1.712.920.000	1.524.509.785	91,21
Program Pelayanan Administrasi Kantoran	162.100.000	132.924.289	91,60
Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.800.000	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.000.000	8.803.764	67,62
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	11.500.000	11.500.000	100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36.000.000	24.157.025	80,52
Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.500.000	19.938.000	90,63
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000	3.500.000	100
Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.000.000	13.500.000	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000	11.455.500	99,61
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100
Penyediaan Makan dan Minuman	12.000.000	12.000.000	100
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.000.000	2.970.000	99
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	18.500.000	18.500.000	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.553.000	138.512.500	99,97
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	25.000.000	25.000.000	100
Pengadaan mebeleur	20.000.000	20.000.000	100
Pengadaan sarana dan prasarana kantor	35.000.000	35.000.000	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52.553.000	52.553.000	100
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.500.000	3.460.000	98,86
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000	2.500.000	100
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	31.000.000	31.000.000	100
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	31.000.000	31.000.000	100
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	14.100.000	14.100.000	100
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	14.100.000	14.100.000	100
Program Pelayanan dan			98,63

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.000.000	7.890.000	
Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes	8.000.000	7.890.000	98,63
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	946.779.000	936.877.000	98,95
Kegiatan Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah	946.779.000	936.877.000	98,95
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	46.910.000	46.625.000	99,39
Kegiatan Fasilitasi APBDes	37.500.000	37.295.000	99,45
Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan	9.410.000	9.330.000	99,15
Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan	97.680.000	97.580.000	99,90
Kegiatan Pembinaan PKK	97.680.000	97.580.000	99,90
Program peningkatan peran serta kepemudaan	14.840.000	14.840.000	100
Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	6.835.000	6.835.000	100
Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	8.005.000	8.005.000	100
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.255.000	9.680.000	94,39
Kegiatan Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan	10.255.000	9.680.000	94,39
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.000.000	4.625.000	86,07
Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.000.000	4.625.000	86,07
Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	62.000.000	61.745.000	99,59
Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	62.000.000	61.745.000	99,59
Program pengembangan data/informasi	5.830.000	5.694.000	97,67
Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	5.830.000	5.694.000	97,67
Program perencanaan pembangunan daerah	31.000.000	30.905.000	99,69
Kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam	31.000.000	30.905.000	99,69
Jumlah Belanja	3.230.495.000	3.058.907.574	94,69

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Buluspesantrern Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Buluspesantrern telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 14 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Buluspesantrern Tahun 2019 secara keseluruhan mencapai Target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2019 pada hakekatnya berkat hasil kerjasama yang baik antara Kecamatan Buluspesantrern dengan UPTD/B dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Buluspesantrern.

Namun disadari bahwa tahun 2019 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala antara lain pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Buluspesantrern senantiasa akan membenahi kinerja pelayanan publik di masa yang akan datang

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan LKjIP Kecamatan Buluspesantrern, Kabupaten Kebumen Tahun 2019 ini. Tentu saja banyak hal yang masih perlu disempurnakan, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Kebumen, 31 Januari 2020

CAMAT BULUSPESANTRERN

WAWAN SUJAKA, S.STP

Pembina

NIP.19780818 199711 1 001.